

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN



GEN Z DAN NEW NORMAL

DUNIA KERJA DAN STRATEGI
DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

2021

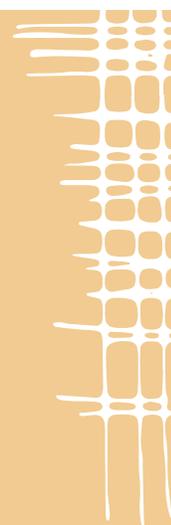
PALEMBANG, 06 MEI



Fakultas Ekonomi
dan Bisnis **UNIVERSITAS
BINA DARMA**

Prosiding

Seminar Hasil Penelitian
06 MEI 2021 • ISSUE 1



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3
Paju Palembang 302264
Telp : (0711) 515582

ISBN 978-602-74335-7-1



SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA
“Gen Z dan NewNormal: Dunia Kerja dan Strategi Dalam
Pengambilan Keputusan”

Palembang, Kamis 6 Mei 2021
di Gedung Utama Universitas Bina Darma



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
“Gen Z dan New Normal: Dunia Kerja dan Strategi Dalam Pengambilan Keputusan”

Steering Committee

: Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M
M. Izman Herdiansyah, S.T., M.T., PhD
Dr. Muji Gunarto, M.Si.
Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec
Dr. Fitriauri, S.E., M.M.

Organizer Committee

Ketua Panitia : Dr. Ari Martino, S.E., M.M.

Sekretariat : Efan Elpanso, S.E., M.M.
Heriyanto, S.E., M.Si.
Asmanita, S.E., M.Si.
Rika Kadarsih, A.Md.

Bendahara : Yeni Widiyanti, S.E., Ak., M.Ak.

Reviewer : Rabin Ibnu Zainal, S.E., M.Sc., Ph.D.
Wiwini Agustian, S.E., M.Si.
Trisminawati, S.E., M.M.
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., C.A.
M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si.

Editor : Sabeli Aliya, S.E.I., M.M.
Irwan Septayuda, S.E., M.Si.

Cover dan Lay out : Sabeli Aliya, S.E.I., M.M.

ISBN : 978-602-74335-7-1

Cetakan : Kesatu, Mei 2021

Penerbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pos 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
<http://fekon.binadarma.ac.id>



KATA SAMBUTAN

Ketua Panitia

Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat-Nya sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma dapat menyelenggarakan **“SEMINAR HASIL PENELITIAN”** pada tanggal 6 Mei 2021.

Tema seminar kali ini adalah **“Gen Z dan New Normal : Dunia Kerja dan Strategi Dalam Pengambilan Keputusan”**. Penyelenggaraan seminar ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pandemi Covid-19 menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan bahkan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada perekonomian dan ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), serta sulitnya Gen Z dalam mendapatkan pekerjaan. Keputusan-keputusan strategis terkait dunia kerja harus dilakukan khususnya di era *new normal*. Esensi dari sebuah pengambilan keputusan adalah proses penentuan pilihan. Hanya saja pada kenyataannya terdapat individu yang mampu dengan tepat mengambil keputusan dan ada juga yang tidak mampu menentukan pilihan di era *new normal* Covid-19. Seminar ini diselenggarakan agar dapat membuka wawasan generasi Z terhadap strategi pengambilan keputusan terkait dunia kerja dan tetap dapat bersaing di era *new normal* Covid-19.

Terselenggaranya seminar ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para pembicara (*keynote speakers*) yang telah hadir dan menyajikan materi pada acara ini
2. Para pemakalah dan peserta seminar
3. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Bina Darma
4. Pihak Rektorat Universitas Bina Darma
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma, Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si.
6. Jajaran Ketua Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma, Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec., dan Dr. Fitriastuti, S.E., Ak., M.M.
7. Seluruh tim panitia Seminar Hasil Penelitian 2021
8. Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM), dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA)
9. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dan dukungan untuk penyelenggaraan seminar ini.

v

Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti seminar, semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Kami panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah SWT.

Palembang, 6 Mei 2021
Ketua Panitia Seminar Hasil Penelitian 2021
Dr. Ari Martino, S.E., M.M

KATA SAMBUTAN

Pimpinan



Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk Kita semua.

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga agenda rutin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma, yaitu Seminar Hasil Penelitian dengan tema “*Gen Z dan New Normal: Dunia Kerja dan Strategi Dalam Pengambilan Keputusan*” dapat terlaksana dengan lancar. Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa hal berubah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas kita dalam bekerja. Pada era normal baru (*new normal*) ini, dunia kerja pun membutuhkan keterampilan tambahan. Untuk itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma yang terdiri atas Program Studi Manajemen dan Akuntansi perlu mengangkat tema tersebut dalam seminar kali ini. Era normal baru memberikan isyarat akan sesuatu atau keadaan yang sebelumnya tidak normal, akan berubah menjadi kebiasaan baru. Pekerjaan yang tadinya bersifat konvensional atau offline menjadi bersifat online. Pekerja harus sudah mulai mampu menguasai hal yang bersifat online. Hal ini menjadi standar baru dimana banyak perusahaan yang mulai menerapkannya (*work from home*). Penerapannya juga terlihat dalam pelaksanaan-pelaksanaan seminar yang mengikuti hal tersebut. Dalam keadaan ini, berbagai makalah telah berhasil diseminarkan online dan dimuat dalam prosiding.

Atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran terutama kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kepada narasumber dan seluruh peserta seminar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Bina Darma atas dukungannya dalam penyelenggaraan kegiatan seminar ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Terimakasih atas kerja keras dari dewan penyunting dalam mewujudkan penerbitan buku prosiding ini, semoga ini menjadi bagian dari amal baik yang akan memberikan manfaat bagi sesama. Akhir kata, semoga buku prosiding ini dapat menyumbangkan manfaat yang besar bagi pengembangan khasanah ilmu dan gagasan dalam pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dr. Muji Gunarto, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

vii

Kata Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hanya karena rahmat dan karunia-Nya, Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2021 telah terselesaikan dengan baik. Prosiding seminar ini merupakan kumpulan makalah hasil penelitian para akademisi dan peneliti yang sebelumnya telah dipresentasikan pada tanggal 6 Mei 2021, yang dilaksanakan di Aula Kampus Utama Universitas Bina Darma Palembang. Adalah suatu kehormatan dan rasa syukur yang tinggi kami dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar Hasil Penelitian dengan mengangkat tema “*Gen Z dan New Normal: Dunia Kerja dan Strategi Dalam Pengambilan Keputusan*”.

Tema ini dianggap tepat karena diperlukannya sumber daya manusia yang sudah siap beradaptasi dengan era revolusi industri 5.0 dengan tantangan dunia kerja dan perekonomian yang semakin kompleks di era New Normal. Prosiding mencakup makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi persaingan kerja dan ekonomi secara global.

Terima kasih, kami ucapkan untuk kesediaan para akademisi dan peneliti atas hasil karya dan sumbangan pemikiran yang dipresentasikan dalam bentuk makalah dan presentasi ilmiah. Selanjutnya penghargaan juga patut diberikan kepada seluruh panitia pelaksana, serta pihak-pihak terkait dalam seminar hasil penelitian sehingga dapat berlangsung dengan baik sampai dengan tersusunnya prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam rangka penguatan peran sumber daya manusia di era New Normal, serta kesiapan menghadapi Era Revolusi Industri 5.0 di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhai. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 6 Mei 2021

Editor

viii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA PANITIA	v
SAMBUTAN PIMPINAN	vii
KATA PENGANTAR EDITOR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PENGARUH PROMOSI IKLAN ELEKTRONIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI APLIKASI GO-JEK Andes Saputra dan Irwan Septayuda	01
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA DOSEN STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS BINA DARMA Aryodi Juniansyah dan Muji Gunarto.....	08
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK Bayu Dewantoro dan Asmanita	15
PENGARUH PRODUK, HARGA, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA BATAGOR MAREM PALEMBANG Fais Adi Jayanto dan Efan Elpanso	24
MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG Hendri dan Mukran Roni	32
PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA DAN STRES KERJA TERHADAP KOMITMEN DOSEN WANITA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nur Qomaryah dan Dina Mellita	42
PENGARUH KOMUNIKASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT SANTANI AGRO PRATAMA PALEMBANG Nyimas Dea Sutra dan M. Amirudin Syarif.....	53
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. HOK TONG PALEMBANG Rizky Pramudya Haryanto dan Heriyanto	62
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM MELAKUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR PERTAMAX Sumardi dan Rabin Ibnu Zainal	72
ix	
PENGARUH JOB INSECURITY DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. DAYA SEMESTA AGRO PERSADA KABUPATEN BANYUASIN Herliya dan Wiwin Agustian	81
PERSEPSI, MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BINA DARMA TERHADAP KARIR DI BIDANG PERPAJAKAN Ayu Nopita Putriani dan Yeni Widyanti.....	88
ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK Dedy Candra Pangestu dan Andrian Noviardy	97
PENGARUH PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND TERHADAP KECENDERUNGAN TERJADINYA KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI EMPIRIS PADA DESA-DESA DI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PALI Dilla Parajunita Osca Cinara dan Fitriastuti	106
PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2013-2018 Ima Agustina dan Ade Kemala Jaya	117
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT-OBATAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO 5 PADA PUSKESMAS MERDEKA PALEMBANG M. Feby Iswanto Pratama dan Siti Nurhayati Nafsiah	128
TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDES Partina dan Henni Indriyani	137
PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH STUDI EMPIRIS PADA SEKOLAH DI KECAMATAN MUARA BELIDA, KABUPATEN MUARA ENIM Putri Idha Hartina dan Poppy Indriani	144
PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS DAN ASSET GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN Nada Soraya dan M. Titan Terzaghi	151
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PENGUNGKAPAN MEDIA TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STUDI KASUS PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Uca Puji Andiani dan Citra Indah Merina	161



Seminar Hasil Penelitian, Manajemen, dan Akuntansi
ISBN : 978-602-74335-7-1
Mei 2021

Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Dedy Candra Pangestu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma Palembang
Email: dcandrapangestu@gmail.com

Andrian Noviardy
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma Palembang
Email: andrian.noviardy@binadarma.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to examine and to analyze how much the influence of tax billing with warning letters and coercive letters in tax revenue. The data used in this study is the 2019-2020 tax revenue data at KPP Pratama Madya Palembang. This type of research data is comparative descriptive. The method used in this research is descriptive analysis, using the ratio of the effectiveness of forced letters and warning letters and the ratio of the contribution of tax arrears. The results of this study indicate that the level of effectiveness of warning letters and coercive letters at KPP Pratama Madya Palembang is still classified as ineffective and the contribution of tax collection with warning letters and coercive letters to tax revenue at KPP Pratama Madya Palembang is classified as very lacking while the obstacles that cause taxpayers not paying tax arrears through a letter of force and a warning letter at the KPP Pratama Madya Palembang is constrained by a long distance and the ability to pay tax arrears is still not good.

Keywords: Ratio of Effectiveness of Forced Letters, Ratio of Effectiveness of Warning Letters, Contribution of Forced Letters and Warning Letters, Taxpayer Barriers.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat yang diperolehnya. Pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat dipergunakan untuk memfasilitasi kepentingan umum (*public service*). Dapat kita ketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Melalui data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dari segi lembar surat yang diterbitkan dan jumlah nominal yang ditegur serta nominal yang dibayar. Untuk tahun 2019 jumlah lembar surat teguran yang diterbitkan yaitu 2.632 lembar dengan nominal kohir yang ditegur Rp580,654,239,654 dan jumlah nominal yang dibayar sebesar Rp21,652,358,462 atau sekitar 3%, kontribusi penerbitan surat teguran.

Jumlah lembar penerbitan surat paksa pada tahun 2019 yaitu 2.635 lembar dengan jumlah nominal kohir yang ditegur Rp198,652,314,580 dan jumlah nominal yang membayar sebesar Rp33,256,978,425 atau sekitar 16% kontribusi penerbitan surat paksa. Hal ini disebabkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Kendala dalam penerimaan pajak selalu ada, diantaranya adalah wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak terutang. Untuk mengatasi itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan tindakan penagihan tunggakan pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang pajak yang harus dibayar wajib pajak baik dengan cara yang lembut atau persuasif dan administratif hingga dengan cara penyitaan dan pelelangan. Salah satu masalah yang dapat terjadi dalam penagihan pajak adalah banyaknya keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga menjadi tunggakan pajak menjadi tinggi. Dalam mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

Peran fiskus dalam penerimaan pajak memiliki andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran dan surat paksa, guna mengurangi tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Sekar, 2013). Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut bisa disebut efektif (Nalle, 2017).

Berdasarkan fenomena masalah di atas peneliti menggunakan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dengan mengetahui apa saja kendala dalam penerimaan pajak tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik menambahkan apa saja kendala dalam penerimaan pajak atas penagihan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu, objek yang digunakan rata-rata berada di pulau Jawa. Maka pada penelitian ini objek yang dipilih yaitu kantor pelayanan pajak (KPP) Madya Palembang. Kedua, penelitian melakukan penelitian dengan menggunakan tahun terbaru. Penelitian ini juga menguji tingkat efektivitas masyarakat dalam membayar pajak dengan cara surat teguran dan surat paksaan dan penelitian ini masih menghasilkan penelitian yang tidak efektif sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan ditempat berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Sudah Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang? (2) Seberapa Besar Kontribusi penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Menurut Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pohan (2017) pengertian pajak yaitu salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dimana pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pemeriksaan pajak

Menurut Menurut Mardiasmo (2019) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Bastari menyatakan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepala wajib pajak untuk melunasi utang. Sedangkan pada pasal 8 ayat 2 menyatakan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Mardiasmo (2019) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa merupakan tunggakan pajak dan biaya penagihan untuk membayarkan atau melunaskan tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

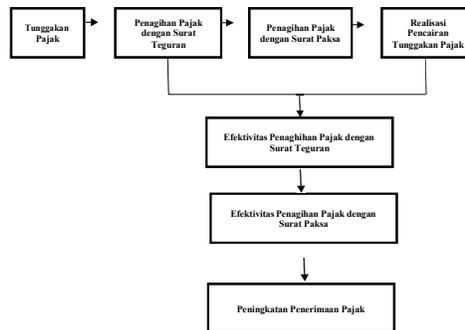
2.6 Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Indra (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

2.7 Kontribusi Penagihan Pajak

Menurut Guritno (2016) pengertian kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Apabila dikaitkan dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan, peranan atau manfaat yang diberikan dari pencairan dari tunggakan pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif yang terdiri atas surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah total realisasi pencairan tunggakan pajak. Efektivitas penagihan pajak bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari tindakan penagihan pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sanusi (2011), tempat, organisasi, satuan, atau lembaga yang dijadikan sasaran penelitian, disertai dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut. Pertimbangan yang dimukakan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Jl. Tasik Talang Semut Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian Deskriptif Komparatif Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa data primer merupakan sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa informasi yang didapat secara langsung dengan pihak KPP Pratama Madya Palembang, yaitu kepala seksi penagihan, pegawai di seksi penagihan pajak dan juru sita pajak.

3.4 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penunjang informasi yang di dapat dari dokumen-dokumen dari pihak KPP Pratama Madya Palembang berupa data perkembangan tunggakan pajak tahun 2017-2019, data penerimaan pajak tahun 2017-2019, data pelaksanaan penagihan aktif dan data lain yang mendukung penelitian.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka rumus tingkat efektivitasnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

a. Rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Palembang. Formula untuk Rasio penerimaan tunggakan pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 4.1 Pembayaran Surat Paksa pada KPP Pratama Madya Palembang

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Pencairan Surat Paksa	Tingkat Efektivitas	Kriteria
	Rp	Rp		
2017	70.472.015.038	46.508.510.733	66%	Kurang Efektif

2018	85.292.784.528	4.839.990.402	5,67%	Tidak Efektif
2019	198.652.314.580	33.256.978.425	16,74%	Tidak Efektif
2020	186.944.823.868	40.781.886.253	4,58%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang tercatat Rp70.472.015.038 dan yang dibayar sebesar Rp46.508.510.733 atau sekitar 66%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong Kurangefektif. Tahun 2018 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 85.292.784.528 dan yang dibayar sebesar Rp 4.839.990.402 atau sekitar 5,67%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat paksa tahun 2018 tergolong tidak efektif. Tahun 2019 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp198.652.314.580 dan yang dibayar sebesar Rp33.256.978.425 atau sekitar 16,74%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat paksa tahun 2019 tergolong tidak efektif. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atas penerbitan surat paksa sebanyak Rp186.944.823.868 dan yang dibayar sebesar Rp40.781.886.253 atau sekitar 4,58%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat paksa tahun 2020 tergolong tidak efektif.

4.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Tabel 4.2 Pembayaran Surat Teguran pada KPP Pratama Madya Palembang

Tahun	Penerbitan Surat Teguran	Pencairan Surat Teguran	Tingkat Efektivitas	Kriteria
	Rp	Rp		
2017	164.538.994.850	4.536.879.191	2,76%	Tidak Efektif
2018	116.806.489.427	6.986.435.368	5,98%	Tidak Efektif
2019	580.654.239.654	21.652.358.462	3,73%	Tidak Efektif
2020	354.937.651.925	30.923.458.168	11,48%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang tercatat Rp 164.538.994.850 dan yang dibayar sebesar Rp4.536.879.191 atau sekitar 2,76%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2017 tergolong tidak efektif. Tahun 2018 mengalami penurunan surat teguran sebanyak Rp116.806.489.427 dan yang dibayar sebesar Rp6.986.435.368 atau sekitar 5,98%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2018 tergolong tidak efektif. Tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat drastis surat teguran sebanyak Rp580.654.239.654 dan yang dibayar sebesar Rp21.652.358.462 atau sekitar 3,73%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2019 tergolong tidak efektif. Tahun 2020 mengalami penurunan dari surat teguran sebanyak Rp354.937.651.925 dan yang dibayar sebesar Rp30.923.458.168 atau sekitar 11,48%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2020 tergolong tidak efektif.

4.3 Kontribusi Pajak

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 4.3 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	46.508.510.733	2.912.112.533.406	1,60%	Sangat Kurang
2018	4.839.990.402	3.124.752.884.988	0,15%	Sangat Kurang
2019	33.256.978.425	5.665.768.690.014	0,59%	Sangat Kurang
2020	40.781.886.253	4.126.937.713.797	0,99%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang pada tahun 2017 sebesar 1,60%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp46.508.510.733 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp2.912.112.533.406 Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang tergolong sangat kurang karena sesuai dengan kriteria dari kontribusi pajak.

Tahun 2018 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,15%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp4.839.990.402 dan penerimaan pajak sebesar Rp3.124.752.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang tergolong sangat kurang. Tahun 2019 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,59%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp33.256.978.425 dan penerimaan pajak sebesar Rp5.665.768.690.014.

Tahun 2020 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,99%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp40.781.886.253 dan penerimaan pajak sebesar Rp4.126.937.713.797. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang tergolong sangat kurang.

4.4 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Tabel 4.3 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	4.536.879.191	2.912.112.533.406	0,15%	Sangat Kurang

Tahun	Penerimaan Pajak	Pencapaian	Persentase	Kategori
2018	6.986.435.368	3.124.752.884.988	0,22%	Sangat Kurang
2019	21.652.358.462	5.665.768.690.014	0,38%	Sangat Kurang
2020	30.923.458.168	4.126.937.713.797	0,74%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang pada tahun 2017 sebesar 0,15%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp4.536.879.191 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp2.912.112.533.406. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang tergolong sangat kurang. Tahun 2018 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2018 yaitu hanya sekitar 0,22%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp6.986.435.368 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp3.124.752.884.988.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang juga tergolong kurang baik. Tahun 2019 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang menunjukkan hasil yaitu hanya sekitar 0,38%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp21.652.358.462 dengan penerimaan pajak sebesar Rp5.665.768.690.014. Tahun 2020 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang menunjukkan hasil yaitu hanya sekitar 0,74%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp30.923.458.168 dengan penerimaan pajak sebesar Rp4.126.937.713.797. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Palembang juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

4.5 Kendala yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Madya Palembang

Berdasarkan hasil wawancara di tempat penelitian yaitu jurusita KPP Pratama Madya Palembang bahwa kendala eksternal dari wajib pajak atau penanggung pajak yang pertama yaitu wajib pajak berusaha menghindari pembayaran pajak dimana wajib pajak kurang mengikuri akan kepatuhan sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, kedua adalah manajemen keuangan wajib pajak kurang baik dalam mengalokasikan dana pelunasan tunggakan pajak. Ketiga adalah kondisi wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan terutama dalam kondisi covid-19 seperti sekarang yang menyebabkan penurunan laba wajib pajak. Keempat yaitu terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai aset lagi.

Serta penyebab jurusita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Madya Palembang dimana jurusita pajak adalah jabatan yang sangat beresiko di KPP, contohnya kejadian di pulau niasa beberapa waktu lalu, terjadinya pembunuhan pada jurusita pajak oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan psikologis wajib pajak yang berbeda-beda ketika dilakukan tindakan penagihan. Terkadang beberapa wajib pajak merasa keberatan atas utang pajak yang disampaikan. Jurusita pajak harus memberikan pendekatan dan penjelasan yang baik kepada wajib pajak agar dapat memahami atas utang pajak tersebut, selain itu KPP Madya Palembang ini memiliki wilayah kerja 2 provinsi yaitu sumsel

dan banka belitung. Dalam melakukan tindakan penagihan ke lokasi wajib pajak, jurusita pajak KPP Madya Palembang terkendala jarang yang cukup jauh. Apalagi di masa pandemi covid-19 yang membatasi pergerakan manusia, membuat pelaksanaan tindakan penagihan sedikit terhambat.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Madya Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu, Tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Madya Palembang masih tergolong tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Madya Palembang yaitu kendala jarak yang terlalu jauh dan juga kendala dalam kemampuan membayar tunggakan pajak dikarenakan cash flow yang masih kurang baik.

6. Referensi

- Anjasmara, dkk. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. E-journal Universitas Pendidikan Ganesha.
- Awa, O. R. Sitinjak, N. D. (2017). Peranan penagihan tunggakan pajak terhadap pertumbuhan tunggakan pajak di KPP Pratama Batu tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Vol. 3.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tata cara penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-474/P/2003 Bentuk, jenis dan orde kartu, formulir, surat dan buku ini digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit : Alfabeta, Bandung. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004 Kebijakan penagihan pajak tahun 2004.
- Surat Edaran Dirjen Pajak SE-01/PJ.75/2004 Petunjuk pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka reorganisasi Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan (KUP).
- Wahdi, (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Dinamika Sosial Budaya, Vol. 20.



**Pengaruh Perspektif *Fraud Diamond* Terhadap Kecenderungan
Terjadinya Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir Pali)**

Dilla Parajunita Osca Cinara
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bina Dharma
Email: dillaparajunita18@gmail.com

Fitriasuri, S.E., Ak., M.M
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bina Dharma
Email: fitriasuri@binadharma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan kompetensi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa-desa yang ada di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir (PALI) berjumlah 17 Desa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 sampel, diperoleh menggunakan metode purposive sampling (mewakili). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS Versi.26. Data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner dan melakukan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Kata Kunci: Teori Fraud Diamond, Kecenderungan Kecurangan, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Peraturan, Komitmen Organisasi, Kompetensi

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of suitability of compensation, enforcement of regulations, organizational commitment and competence on the tendency of fraud in village financial management. This research was conducted in 17 villages in Tanah Abang, Penakal Abab Lematang Ilir (PALI) District. The sample in this research amounted to 85 samples, obtained using purposive sampling method (representing). This research uses descriptive quantitative analysis method. The data source used is primary data. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis method with SPSS version 26 analysis tool. Data obtained by distributing questionnaires and conducting interviews with respondents. The results showed that the suitability of compensation and enforcement of regulations had no effect on the tendency of fraud in village financial management. Meanwhile, organizational commitment has a negative effect on the tendency of fraud in village financial management.

Keywords: Diamond Fraud Theory, Fraud Tendency, Suitability Compensation, Regulations Enforcement, Organizational Commitment, Competence.